

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system politik demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya. Adapun ciri paling mendasar dari sebuah Negara demokrasi adalah keberadaan Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut dengan Pemilu. Pemilu menjadi sangat penting karena berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai pergantian pemimpin secara periodik dan tertib.¹

Pada negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sarana memilih pejabat-pejabat publik dibidang eksekutif maupun legislative, serta menjadi sarana dalam menyampaikan aspirasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.² Pengaturan mengenai pemilu juga sudah diatur dalam Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.

Penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008) hlm.105.

² Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 51.

penyelenggaraan Pemilu. Ada empat macam pemilu yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilu dapat berjalan dengan lancar apabila ada keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat. Keikutsertaan dari masyarakat ini dapat dibangun dengan cara merubah perilaku dan mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi politik antara lembaga politik dengan masyarakat. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah mensukseskan pemilihan umum. Komunikasi politik bertujuan membentuk dan memenangi pemilihan, dan mempengaruhi kebijakan politik negara atau kebijakan publik. Komunikasi politik pada level penyelenggaraan pemilu dimaknai sebagai upaya menyukseskan pemilu dan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Komunikasi politik ini juga sangat penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut Pilkada. Pilkada merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin di tingkat daerah. Pelaksanaan pilkada ini sudah diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah itu sendiri.”

Pilkada secara langsung sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh para elit ditingkat lokal. Pemerintahan daerah adalah suatu lembaga yang pokok karena memiliki pengaruh pembelajaran terhadap negaranya).³

Pilkada merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi lokal yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik, dan sarana sirkulasi elit pemerintahan. Seperti yang diketahui saat ini, tahapan Pilkada memiliki aktifitas yang mengharuskan berkumpulnya atau terjadinya pertemuan tatap muka antara penyelenggaraan pemilu dengan pemilih.

Pada penyelenggaraan pilkada secara langsung, tentu melibatkan berbagai pihak, diantaranya adalah keterlibatan partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik tidak muncul dengan sendirinya, tetapi kemunculan partai politik ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan memiliki peran penting bagi terlaksananya pilkada.

Miriam Budiardjo mengemukakan sebagai berikut:

“Partai politik suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan

³Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* (Alumni, Bandung, 2005) hlm.16

merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan yang mereka miliki”.⁴

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik bagi anggota bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu fungsi partai politik itu ialah pendidikan politik, proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang di peroleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak di sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.⁵

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), Hlm. 398

⁵Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (PT Gramedia Widiasarana Indonesia:Jakarta, 2010). Hlm 159

Pendidikan politik tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sosialisasi politik, yang berarti suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah yang pada Desember 2020 lalu melaksanakan pilkada secara serentak. Pilkada ini mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Atau lebih dikenal dengan sebutan UU tentang pilkada 2020 dimasa pandemi Covid-19, sedangkan pada tingkat nasional, pilkada diselenggarakan di 270 daerah (8 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 32 provinsi).

Oleh karena itu, KPU Kota Jambi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Jambi mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Pasal 1 terdapat perubahan ketentuan mengenai sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbinganteknis kepada penyelenggara pemilihan. dapat dilihat dari kegiatan Subbag Teknis dan Hupmas Komisi

Pemilihan Umum Kota Jambi yang hanya mengikuti Rakor Sosialisasi Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei dan Hitung Cepat melalui link *zoom meeting*.⁶

Tentunya dengan pengurangan dan pembatasan kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut menimbulkan ketidakefesiensi komunikasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal inilah yang membuat penurunan persentase perhitungan suara di Kota Jambi menjadi 54,77% yang seharusnya dicapai sebesar 77,5%. Dapat dilihat berdasarkan tabel rekapitulasi tingkat partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Tabel. 1.1
Rekapitulasi tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Kota Jambi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase Penggunaan Suara
1	Alam Barajo	66.150	41.713	63,06
2	Danau Sipin	28.463	19.838	69,70
3	Danau Teluk	9.124	6.711	73,55
4	Jambi Selatan	37.663	24.656	65,52
5	Jambi Timur	44.138	29.998	67,96
6	Jelutong	38.839	25.866	66,60
7	Kota Baru	50.367	-	-
8	Paal Merah	66.240	-	-
9	Pasar Jambi	8.186	4.733	57,82
10	Pelayangan	9.125	9.125	72,68
11	Telanaipura	32.008	20.981	65,55
	Total	390.273	181.128	54,77

Sumber: KPU Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase perhitungan suara sebanyak 22,8%. Kecamatan yang mengalami penurunan persentase perhitungan suara terbanyak yaitu kecamatan Pasar

⁶Kota-jambi.kpu.gp.id

Jambi yaitu dengan jumlah 57,32%, sehingga menyebabkan jumlah perolehan suara yang tidak mencapai target. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 terdapat 3 pasang calon yang pertama Nomor urut 1 Cek Endra- Ratu Munawaroh yang merupakan kandidat dari partai politik Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selanjutnya, pasangan calon Nomor urut 2 Fachrori Umar- Syafril Nursal yang merupakan kandidat dari partai politik Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Terakhir, pasangan calon Nomor urut 3 Al Haris- Abdullah Sani yang merupakan kandidat dari partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun dari hasil perhitungan suara justru pasangan Al Haris dan Abdullah Sani lebih unggul dibanding 2 pasangan lainnya yaitu pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh serta pasangan Fachrori Umar dan Syahril Nursal. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan, mengingat 2 pasangan lawan yaitu pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh dan pasangan Fachrori Umar-Syahril Nursal memiliki *figure* yang sangat mendukung dalam sistem pemerintahan Provinsi Jambi.

Akan tetapi, latar belakang dari 2 pasangan calon ini ternyata belum mampu menarik simpatisan masyarakat Kota Jambi, sehingga banyak masyarakat yang menjatuhkan pilihan pada pasangan Al Haris dan Abdullah Sani. Kemenangan Al Haris dan Abdullah Sani ini tentu tidak lepas dari

komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan dan seluruh partai pengusung yaitu PKB, PKS dan PAN yang telah melakukan segala upaya untuk meyakinkan masyarakat Kota Jambi, termasuk menjalin komunikasi politik dengan masyarakat.

Komunikasi politik ini menjadi ajang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara internal maupun eksternal. Terkait pembatasan kegiatan sosialisai pada pemilihan gubernur tahun 2020 yang berdampak pada penurunan persentase perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Jambi, diduga akibat dari kegiatan sosialisasi yang kurang efektif dan tidak sampai kepada sasaran masyarakat luas karena adanya pembatasan kegiatan.

Pada kegiatan sosialisasi KPU Provinsi dengan Parpol, kegiatan sosialisasi dan tahapan pemilihan serentak harus melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas, ditambah dengan perintah kita harus melaksanakan Protokol Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pandemi.⁷ Hal ini tentu berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Adapun perbandingan tingkat penggunaan hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2015 lalu sebagai berikut:

⁷Jambi.kpu.go.id.

Tabel. 1.2
Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 Tingkat
Kota Jambi

No.	Kecamatan	Total Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Perolehan Suara		DPT Pilgub 2015
						HBA	Zumi Zola	
1.	Jelutung	44.326	29.614	908	30.522	10.229	19.385	43.458
2.	Pasar Jambi	10.347	5.889	161	6.050	1.972	3.917	10.094
3.	Jambi Timur	58.979	40.339	1.471	41.810	12.681	27.658	58.097
4.	Pelayangan	9.782	7.409	160	7.569	5.522	1.887	9.712
5.	Jambi Selatan	94.672	62.183	2.147	64.330	21.143	41.040	93.041
6.	Kota Baru	125.339	74.456	2.112	76.568	24.889	49.567	122.399
7.	Telanaipura	67.192	45.107	1.037	46.144	14.743	30.364	64.996
8.	Danau Teluk	9.360	7.076	161	7.237	5.125	1.951	9.236
Total		419.997	272.073	8.157	280.230	93.304	175.769	411.033

Sumber : KPU Kota Jambi

Tabel. 1.3
Persentase Suara Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 Tingkat Kota Jambi

Kecamatan	Persentase
Danau Teluk	77,32%
Jambi Selatan	67,95%
Jambi Timur	70,39%
Jelutung	68,86%
Kota Baru	61,09%
Pasar Jambi	58,47%
Pelayangan	77,38%
Telanaipura	68,67%
Total	68,90%

Sumber: KPU Kota Jambi

Tabel di atas menunjukkan jumlah daftar perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada tahun 2015 dimana jumlah perolehan suara mencapai sebanyak 272.073, dengan jumlah persentase perolehan suara mencapai 68,90% tergolong tinggi dibandingkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 yang hanya mencapai persentase 54,77% dengan jumlah 181,128. Hal ini menunjukkan

bahwa pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 mengalami penurunan perolehan suara.

Rasa keingintahuan penulis terhadap efektivitas sosialisasi yang dilakukan ketiga calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2020 sangat tinggi, penulis ingin mengetahui apa-apa saja yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi sehingga berdampak pada perolehan suara pasangan Al Haris dan Abdullah Sani menjadi lebih tinggi dibanding dua calon lainnya.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di gunakan penulis kali ini yaitu yang dilakukan oleh Aditya Putra yang berjudul “Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)”.⁸ Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang partisipasi politiknya terbilang rendah. Hasil analisis penelitian ini berupa mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sekaligus meningkatkan perolehan suara calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, baik pada tataran komunikator, pesan, saluran, komunikasi, serta efek dan feedback. Yang membedakan penelitian Aditya Putra dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas pelaksanaan dan perancangan strategi komunikasi Partai Politik PDIP, Partai

⁸Aditya Putra, *Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)*, Jurnal, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia 2020.

Politik Demokrat, dan Partai Politik PAN pada perolehan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur di Kota Jambi.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ismalia Rianda yang berjudul “Analisis Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi kasus pada Pasangan Ahmad heryawan-Deddy mizwar dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013)”.⁹ Hasil dari penelitian ini berfokus pada: Bagaimana pesan dalam komunikasi politik pasangan Aher-Demiz dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013, bagaimana komunikator dalam komunikasi politik pasangan Aher-Demiz dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 serta bagaimana media dalam komunikasi politik pasangan Aher-Demiz dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013. Persamaannya dengan penelitian ini, yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana komunikasi politik yang dilakukan masing-masing partai pengusung dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi penelitian tersebut tidak membahas tentang penurunan maupun perolehan suara pada hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan Skripsi dengan judul “**Strategi Komunikasi Politik Pasangan Al Haris-Abdullah Sani pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020**”.

⁹Ismalia Rianda, *Analisis Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi kasus pada Pasangan Ahmad heryawan-Deddy mizwar dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Telkom, Bandung 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana srategi komunikasi politik pasangan Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kota Jambi?
2. Apasaja faktor yang mendukung kemenangan Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis srategi komunikasi politik pasangan Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kota Jambi.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mendukung kemenangan Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengembangan ilmu komunikasi Universitas Jambi Khususnya tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta mensukseskan Pilkada dimasa mendatang.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk pengembangan penelitian di bidang Ilmu Politik dan Organisasi yang berkaitan tentang strategi komunikasi khususnya KPU Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik Khususnya terkait dengan strategi komunikasi sebuah instansi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan telaah awal untuk meningkatkan strategi komunikasi politik dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun rencana.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah frase terdiri dari dua kata “komunikasi” dan “politik” yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah digabungkan dua kata tersebut jadilah sebuah pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli. Komunikasi politik menurut Mc Nair yang dikutip oleh Hafied Cangara murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan,

apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda.¹⁰

Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan per-politikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti di atas, biasanya saluran komunikasi yang digunakan melalui media massa, baik dengan bentuk rapat umum, konferensi pers, dan lain-lain. Baiklah, kita ambil contoh sederhana dari para calon wakil rakyat yang akhir-akhir ini semakin intens untuk berkomunikasi dan "dekat" dengan rakyat, mengkampanyekan keunggulan atau kelebihan mereka kepada khalayak, dengan menaruh harapan pada media massa pada umumnya untuk mendapatkan "anggukan kepala" khalayak bahwa "ya, kami memilihmu". Tentunya, dalam konteks seperti ini komunikasi yang digunakan oleh calon-calon wakil rakyat tersebut termasuk komunikasi politik dengan gaya retorika mereka masing-masing.

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk-

¹⁰Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 36.

bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus adalah:¹¹

1) Retorika Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu rhetorica, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak (khalayak).

2) Agitasi Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu agitare, yang artinya bergerak atau menggerakkan dan dalam bahasa Inggris, agitation. Menurut Harbert Blumer yang dikutip oleh Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat, kemudian menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa.

¹¹Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 65.

3) Propaganda Politik

Propaganda politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah propaganda putih (*white propaganda*) yaitu propaganda yang diketahui sumbernya secara jelas, atau sering disebut sebagai propaganda terbuka. Misalnya propaganda secara terang-terangan melalui media masa dengan memunculkan berbagai isu yang bertujuan untuk mempengaruhi objek politik.

4) Kampanye Politik

Bentuk kampanye komunikasi ini yang paling menarik dan semarak dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi.¹²

1.5.2. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan

¹²Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm. 173.

menejemen (management) untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja yang hanya menunjukkan peta arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹³

Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik, prasyarat dalam sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya disinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada.¹⁴

Strategi komunikasi politik dalam konteks pilkada, memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat incumbent saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa

¹³Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remadja RosdaKarya, 2004), hlm.32.

¹⁴Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Fredrich-Nouman-Stiftung 2004), hlm. 11

diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apabila untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat dalam pilkada.¹⁵

1.5.3. Partai Politik

Menurut Elisabeth Sitepu menyatakan bahwa:

“sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyanggah demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik tercantum bahwa “Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum”.¹⁶

Adapun pengertian partai politik ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

¹⁵*Ibid*, hlm.12

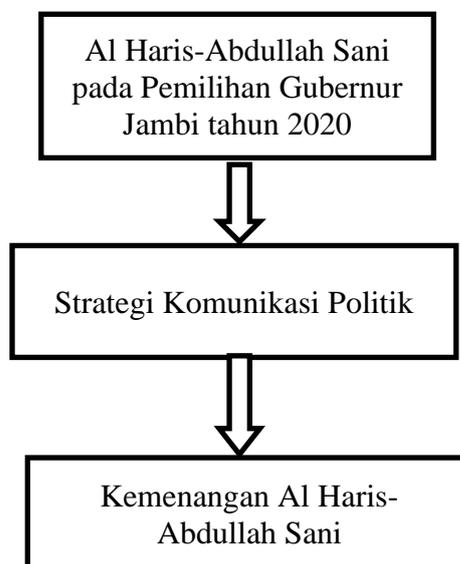
¹⁶Elisabeth Sitepu, Peranan Partai Politik Dalam Memebrikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat, Hlm 1, diakses tanggal 2 Juni 2021, Pukul 19:06 WIB.

memebala kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasipemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kerangka berfikir tentang penelitian ini:

Gambar 1.1
Strategi Komunikasi Politik Koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada
Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020



¹⁷*Ibid*, hlm3.

Bagan kerangka berfikir diatas telah menunjukkan alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan melihat komunikasi Politik yang dilakukan oleh pasangan Al Haris dan Abdullah Sani beserta tim sukses dan partai pengusungnya, yaitu PAN, PKB dan PKS. Peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi politik kAl Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Digunakan dalam upaya memahami permasalahan di lapangan secara utuh dengan menggali lebih dalam data dan informasi dari lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, yaitu data yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

¹⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 4

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan kajian melalui studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara langsung di Kantor DPD PKS Kota Jambi, Kantor DPD Partai PKB Kota Jambi, dan Kantor DPD PAN Kota Jambi, selain itu juga dilakukan studi kepustakaan dari berbagai referensi dan bahan bacaan yang tersedia sesuai relevansinya dengan materi yang habis. Disamping ini pula didasarkan pada pengamatan dan pengalaman lapangan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor DPD PKS Kota Jambi, Kantor DPD Partai PKB Kota Jambi, dan Kantor DPD PAN Kota Jambi, karena peneliti melihat terdapat penurunan persentase perhitungan suara yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan dengan kurangnya efektifitas sosialisasi yang tidak kondusif.

1.7.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi. Fokus penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diproses dari hasil wawancara dengan beberapa informasi.

¹⁹*Ibid.* hlm. 9

Selanjutnya data sekunder, berasal dari beberapa buku, jurnal, skripsi maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan materi dalam pembahasan dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengumpulkan data pada objek penelitian yaitu Partai Politik PKS, PAN dan PKB. Hal ini dikarenakan ketiga partai politik ini merupakan partai pengusung Al Haris-Abdullah Sani pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan. Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis, dokumen maupun foto. Pada penelitian dokumentasi dan foto merupakan sumber data sekunder.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu²⁰. Pada penentuan sampel, kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang memahami dan bersedia memberikan informasi mengenai strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi.

Informan yang akan ditunjuk juga dipilih melalui pertimbangan yang matang oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketua dan sekretaris DPD PKS Kota Jambi. Tujuan dipilihnya ketua DPD PKS Kota Jambi adalah untuk memperoleh informasi terkait strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi.
- b. Ketua DPD PKB Kota Jambi. Tujuan dipilihnya ketua DPD PKB Kota Jambi adalah untuk memperoleh informasi terkait strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009) hlm. 28.

- c. Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kota Jambi. Tujuan dipilihnya ketua DPD PAN Kota Jambi adalah untuk memperoleh informasi terkait strategi komunikasi partai politik koalisi Al Haris-Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi.
- d. Pengamat Politik di Kota Jambi.
- e. Tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RT Kecamatan Pasar Jambi dan Ketua RT Kecamatan Paalmerah.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:²¹

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Cara *in depth interview* (wawancara mendalam) secara substansional dengan informan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

²¹*Ibid.* hlm. 137-145.

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses

²²*Ibid.*, hlm. 244.

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah pengodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Melalui triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan

berbagai sumber data.²³ Adapun metode triangulasi data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

c. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang

²³*Ibid.*, hlm. 241.

didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.